BAB I

KESIMPULAN

I.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat diambil. sebagai berikut implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan prinsip-prinsip *Good Government*, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik. Penggunaan SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi suara telah membantu mempercepat proses penghitungan hasil pemilu secara digital, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam pelaporan hasil pemungutan suara. Sistem ini juga memberikan akses informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat, memungkinkan publik untuk turut mengawasi proses pemilu secara langsung melalui publikasi hasil perolehan suara dari tingkat TPS. Hal ini memperlihatkan komitmen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari pelayanan publik yang demokratis.

Selain itu, dari sisi kelembagaan dan sumber daya manusia, KPU telah menunjukkan upaya yang cukup kuat dalam menyiapkan seluruh tingkatan penyelenggara pemilu untuk mengoperasikan SIREKAP melalui bimbingan teknis, sosialisasi, serta simulasi berjenjang. Kehadiran kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Bawaslu, partai politik, BSSN, kepolisian, dan lembaga akademik seperti

ITB, memperkuat legitimasi dan keamanan sistem SIREKAP. Namun demikian, tantangan masih ditemukan, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang memiliki keterbatasan jaringan internet, ketersediaan perangkat teknologi, serta kemampuan operator. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan yang bersifat teknis maupun struktural yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius ke depan.

Dari perspektif birokrasi dan tata kelola, implementasi SIREKAP sudah ditetapkan secara formal dalam regulasi penyelenggaraan pemilu, tetapi masih ada beberapa catatan penting terkait pembagian otoritas akses antar lembaga. Misalnya, keterbatasan peran Bawaslu yang hanya diberikan akses sebagai penonton (viewer) menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pengawasan yang lebih mendalam terhadap sistem. Hal ini menjadi penting untuk dievaluasi agar sistem pengawasan terhadap SIREKAP dapat berjalan lebih optimal dan tidak menimbulkan keraguan atas integritasnya. Selain itu, keberhasilan sistem ini juga sangat bergantung pada penerimaan dan pemahaman publik, sehingga edukasi kepada masyarakat luas, termasuk partai politik, saksi, dan pemilih, harus terus ditingkatkan.

Dalam hal efektivitas, SIREKAP terbukti mendukung tujuan utama pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Meskipun tidak sepenuhnya menggantikan proses manual, kehadirannya menjadi pelengkap penting yang mempercepat dan mempermudah proses rekapitulasi serta menambah lapisan transparansi. Ketepatan

sasaran kebijakan terlihat dari bagaimana sistem ini mampu menyediakan data yang cepat dan akurat, sekaligus memperkecil potensi manipulasi suara di tingkat bawah. Namun, untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan sistem ini di masa mendatang, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek legal, teknis, dan sosial dari implementasi SIREKAP. Kesiapan SDM, penyediaan infrastruktur digital yang merata, penguatan regulasi, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan menjadi faktor-faktor penentu keberlanjutan penggunaan sistem ini pada pemilu berikutnya.

Persepsi para stakeholder terhadap implementasi SIREKAP secara umum menunjukkan respons yang positif, meskipun disertai sejumlah catatan dan kehati-hatian. KPU sebagai penyelenggara utama memandang SIREKAP sebagai langkah maju dalam modernisasi pemilu dan sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi. Bawaslu, meskipun menyambut baik kehadiran sistem ini, tetap menyoroti perlunya penguatan akses dan fungsi pengawasan agar dapat menjalankan peran pengawasan secara lebih efektif. Sementara itu, partai politik dan peserta pemilu cenderung mendukung penggunaan teknologi ini, namun mengharapkan jaminan integritas, keamanan data, serta proses sosialisasi yang merata agar tidak terjadi kesenjangan informasi di lapangan. Di sisi lain, masyarakat dan pemilih yang telah mengakses hasil SIREKAP secara daring cenderung merasakan manfaat transparansi yang lebih nyata, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang merasa belum sepenuhnya memahami fungsi dan mekanisme kerja sistem ini. Oleh karena itu, persepsi positif ini perlu terus

dipelihara dan ditingkatkan melalui komunikasi publik yang terbuka, pelibatan aktif stakeholder, serta perbaikan teknis dan kelembagaan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan SIREKAP merupakan bentuk inovasi teknologi yang strategis dan relevan dengan perkembangan zaman dalam penyelenggaraan pemilu. Inovasi ini tidak hanya menandai pergeseran menuju digitalisasi pemilu, tetapi juga menjadi simbol perwujudan pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan evaluasi berkelanjutan dan komitmen dari semua pihak, SIREKAP berpotensi besar untuk menjadi sistem yang lebih matang dan terpercaya di masa depan, serta mendorong proses demokrasi Indonesia yang semakin inklusif, transparan, dan efisien.

I.2 Rekomendasi

Rekomendasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu akademik dan praktis. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti, sebagai berikut:

I.2.1 Rekomendasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai penambahan referensi keilmuan Ilmu Administrasi Negara terkait studi pelayanan publik, manajemen organisasi publik.
2. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan topik yang serupa sehingga dapat

dikembangkan secara lebih luas dan mendalam melalui metode, teori, dan objek penelitian yang berbeda.

3. Untuk mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi agar dapat menjadi sebuah pembelajaran ilmu mengenai Implementasi *Good Government* dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Studi Informasi Rekapitulasi Pada Pemilihan Umum 2024)
4. Bagi Universitas Islam 45 Bekasi semoga dengan hasil peneliti ini dapat bermanfaat untuk banyak orang terutama untuk mahasiswa dan dosen agar dapat melaksanakan penelitian yang lebih baik untuk kedepannya

I.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud ingin memberikan rekomendasi atau saran bagi lembaga atau instansi dengan harapan dapat bermanfaat bagi lembaga atau instansi tersebut, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum perlu meningkatkan sosialisasi secara masif mengenai SIREKAP kepada kalangan masyarakat, hal ini penting untuk memastikan masyarakat dapat memahami bagaimana tujuan dan fungsi dari diterapkannya SIREKAP dalam Pemilihan Umum agar tidak adanya kesalahpahaman dalam memahami tujuan dan fungsi dari penerapan SIREKAP itu sendiri.
2. Komisi Pemilihan Umum perlu memberikan pelatihan teknis berkelanjutan untuk petugas KPPS dan operator SIREKAP untuk memperlancar selama proses

rekapitulasi suara dan meminimalisir terjadinya kesalahan selama proses peng *Upload* an hasil rekapitulasi suara ke SIREKAP.

3. Komisi Pemilihan Umum perlu memberikan akses pengawasan penuh kepada Bawaslu terhadap penerapan SIREKAP, hal ini dikarenakan Bawaslu hanya memiliki akses sebagai *viewer* saja selama proses rekapitulasi menggunakan SIREKAP dan tetap melakukan proses pengawasan secara manual dengan mencocok kan hasil rekapitulasi pada lembar Form C hasil dengan SIREKAP
4. Perlu adanya penguatan sistem keamanan dan perlindungan data SIREKAP, belajar dari pengalaman pada Pemilu 2024 yang banyak terjadi nya percobaan serangan *Cyber* yang menargetkan *Database* dari SIREKAP. Demi mewujudkan keamanan sistem dan perlindungan data bagi seluruh masyarakat Indonesia.
5. Perlu adanya kembali revisi dan penguatan regulasi terkait penggunaan SIREKAP, supaya SIREKAP tidak hanya digunakan sebagai alat bantu saja, namun juga dapat digunakan sebagai acuan hitung resmi. Tentu nya dengan adanya dasar hukum yang lebih kuat.
6. Bagi lembaga lain atau instruksi terkait, penelitian ini memberikan panduan untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam menuju Modernisasi perhitungan suara dalam Pemilihan Umum di Indonesia.